

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM UPPKS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Durrotu'aini Perwitasari Sutoyo¹

¹Email :

¹Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Darul 'Ulum Jombang

ABSTRACT

Regional development is development carried out at levels and changes over a certain period of time with a set of variables and returns for factors (factor returns) in an area in one way, namely poverty alleviation, one of which is through COMDEV. The purpose of this study was to analyze the effect of regional development on poverty alleviation efforts and local government efforts in poverty alleviation through the UPPKS Comdev program in Kebonsari District, Madiun Regency. With a qualitative descriptive research approach, the type of case study is in Kebonsari District, Madiun Regency with 13 villages using the Stratified Random Sampling technique, obtained samples from pre-prosperous and prosperous families 1 each village as many as 8 people, so the total sample size is 104 people. Data collection techniques using field studies and literature studies. It was found that there was a significant influence on regional development on poverty alleviation efforts in Kebonsari District, Madiun Regency. And there is no significant influence of the UPPKS Comdev program on poverty alleviation in Kebonsari District, Madiun Regency. The lack of influence of the UPPKS Comdev program in Kebonsari District, Madiun Regency is caused by the lack of aspects of increasing insight and knowledge; aspects of implementing leadership styles as well as aspects of providing capital assistance and the lack of ATTG (Appropriate Technology Tools) assistance received.

Keywords: Analysis, Community Empowerment, UPPKS Program, Community Welfare

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi (Kartasasmita, 1997).

Pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilakukan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu dengan suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor *returns*) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010)

Pembangunan pro rakyat yaitu pembangunan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, artinya sasarannya adalah sebanyak-banyaknya keluarga. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) sebenarnya merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan sasaran pada keluarga khususnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Madiun.

Pada Sensus Penduduk Tahun 2016, dari 551.896 keluarga di Kabupaten Madiun terdapat penduduk pra sejahtera atau miskin sebanyak 71.421 keluarga atau 8 persen keluarga (BPS Kab. Madiun 2020).

Kecamatan Kebonsari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun dengan luas 49,86 km², dengan jumlah penduduk 65.587 jiwa, dan kepadatan 1.315 jiwa/km² dan terdiri dari 13 desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS kabupaten Madiun, keluarga pra sejahtera masyarakat Kecamatan Kebonsari berjumlah 4.362 keluarga atau menduduki peringkat keenam adanya kemiskinan di wilayah Kabupaten Madiun.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan pembangunan yang berbasis pengembangan masyarakat atau dalam istilah lain disebut sebagai *community development* atau sering disingkat CD atau *Comdev*.

Comdev adalah sebagai upaya mengintegrasikan sistem pembangunan partisipatif ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler, dirancang untuk mendorong dan menguatkan inisiatif daerah dalam melaksanakan program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, kekhususan dan kebutuhan daerah. Salah satu program *Comdev* adalah UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), program UPPKS sendiri dikelola oleh BKKBN. Di dalam pelaksanaannya program UPPKS yang juga merupakan salah satu program pemberdayaan keluarga yang sasaran utamanya adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I untuk itulah perlu diterapkan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang diharapkan dapat membantu anggota kelompok. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembangunan daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan upaya pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan melalui program *Comdev* UPPKS di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif (Arikunto,1998). kualitatif (Moleong, 2005) dengan pendekatan penelitian studi kasus (case study).(Sugiono, 2004:21). Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan 13 Desa. Dipilihnya Kecamatan Kebonsari karena Kecamatan Kebonsari dalam kriteria tingkat kemiskinan nomor 6 di Kabupaten Madiun. Untuk menentukan jumlah sampel yang digunakan teknik Stratified Random Sampling. Sampel yang diambil adalah dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I masing-masing desa sebanyak 8 orang, jadi jumlah sampel seluruhnya 104 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan 1. Studi Lapangan (*Field Research*) berupa Observasi (pengamatan langsung), *Interview* (wawancara), dan Kuesioner. 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Arikunto (2006:149)

Variabel Penelitian terdiri dari Variabel Independen: Pembangunan Daerah (X1) Pengembangan masyarakat UPPKS (X2) dan Variabel Dependen: Kemiskinan (Y). Instrumen penelitian menggunakan Kuesioner dengan skala Skala Likert (Sugiono, 2010). Ruang lingkup penelitian adalah kebijakan tentang pembangunan daerah melalui program Community Development UPPKS untuk dapat mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Kebonsari Kecamatan Madiun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.(Sani dan Maharani, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Saradan terletak di 7° 38' 0" LS s/d 7° 44' 0" LS dan 112° 13' 0" BT s/d 112° 18' 0" BT. Kecamatan Saradan memiliki 13 desa, antara lain, Balerejo, Bacem, Kebonsaari, Kedondong, Kradegan, Mojorejo Palur, Pucanganom, Rejosari, Sidorejo, Singgahan, Sukorejo, Tambakmas, Tanjungrejo..

Kecamatan Kebonsari di sebelah Utara dibatasi oleh Kecamatan Jiwan, di sebelah Selatan dibatasi Kabupaten Gemarang, di sebelah Timur dibatasi oleh Kecamatan Caruban, dan di sebelah Barat dibatasi oleh Kecamatan Gemarang .

Kecamatan Kebonsari merupakan salah satu wilayah yang didominasi pertanian. Selain itu Kecamatan Kebonsari adalah kecamatan yang dilalui jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Madiun dan Ngawi. Jumlah Agen 22 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 5.355 dengan jumlah penduduk Kecamatan Kebonsari sejumlah 76.299 penduduk. Mata pencaharian penduduk terbesar pada bidang pertanian dan di bidang perdagangan disamping ada bidang atau profesi yang lain. Potensi yang tertinggi ada pada peternakan, kemudian potensi perhubungan.

Kecamatan Kebonsari merupakan wilayah pengembangan (WP) Kabupaten Madiun dalam fungsi pengembangan pertanian khususnya kawasan peternakan. Dengan peran sebagai wilayah pengembangan potensi Sumber Daya Alam dan wilayah pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Kebonsari. Dalam rangka mendukung fungsi tersebut perlu dikembangkan pusat penelitian dan pendidikan untuk pengembangan SDM yang diarahkan di sektor Agrobisnis. Struktur kegiatan utama yang diperlukan adalah perkebunan, perdagangan, pariwisata, kehutanan, agroindustri, dan pertanian. Wilayah Kebonsari diprioritaskan sektor-sektor tersebut karena menghasilkan komoditi seperti mete, kelapa, cengkeh, kapuk, kenanga, temulawak, lada, kencur, jahe, serai, kunyit, lengkuas, pandan, kakao, tebu, tembakau Jawa, Virginia, dan kopi. industri anyaman tetap dikelola untuk mengolah hasil hutan.

Total anggaran Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kebonsari tahun 2020 adalah Rp.2.458.563.500,- (Dua milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah Rp.767.166.662,- atau 32,01%

Pada tahun 2017 sampai pada tahun 2019, kondisi sosial untuk tingkat kesejahteraan Kecamatan Kebonsari tidak ada perubahan sama sekali, akan tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 4310 pada Keluarga Pra Sejahtera dan penurunan dari 5465 menjadi 5515 pada Keluarga Sejahtera I dan meningkat dari 10924 menjadi 11047 pada Keluarga Sejahtera III dengan kenaikan penduduk 0,1%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada peningkatan tingkat kesejahteraan pada Kecamatan Kebonsari sebesar 0,98 % pada tingkat Keluarga Pra Sejahtera, dan terdapat kenaikan pada tingkat Keluarga Sejahtera III sebesar 1,01%.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kecamatan Kebonsari

Program UPPKS di Kabupaten Madiun telah ada sejak tahun 1992 namun dengan nama Takesra, Takukesra yang kemudian berubah menjadi UPPKA pada tahun 1994 dan pada tahun 2000-an berganti nama menjadi UPPKS. Program UPPKS memiliki dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Dan terdapat Peraturan Kepala BKKBN Nomor 15/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

UPPKS di Kabupaten Madiun dikelola dan dikoordinasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan mitra kerja perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. UPPKS dikelola dalam Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Setiap kecamatan di Kabupaten Madiun memiliki kelompok UPPKS.

Kecamatan Kebonsari dengan luas wilayah 4.986 km² memiliki jumlah penduduk 37.044 jiwa. Jumlah peserta KB pada Kecamatan Kebonsari pada tahun 2018 sebanyak 11.609 jiwa dari total 14.444 Pasangan Usia Subur (PUS). Kecamatan Kebonsari memiliki 7 (tujuh) Kelompok UPPKS yakni Kebonsari, Bacem, Mojorejo Palur, Pucanganom, Singgahan, Tambakmas, Kradegan

Pada awalnya pada tahun 2009 semua desa pada kecamatan Kebonsari diberikan modal untuk kegiatan UPPKS dari BKKBN. Modal awal UPPK di Kecamatan Kebonsari sebesar Rp. 500.000. Akan tetapi dari 13 desa di Kecamatan Kebonsari hanya 7 desa yang masih aktif dan efektif melakukan kegiatan UPPKS.

Bentuk kegiatan UPPKS di tiap desa di Kecamatan Ngoro diberlakukan model simpan pinjam berkelanjutan, yaitu anggota memiliki hak untuk meminjam hanya satu kali dalam satu tahun dengan pengembalian 2 bulan, yang kemudian di berikan kepada anggota yang lain. Peminjaman modal dapat dilakukan hanya untuk keperluan usaha diantaranya warung kelontong, pembuatan kripik/kue, menjahit yaitu sebesar Rp. 250.000,-. Pada satu desa biasanya terdapat 10 – 25 anggota tergantung pada modal yang tersedia pada UUPKS Desa. Berikut kondisi UPPKS Kecamatan Kebonsari sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 1
Kondisi Perkembangan UUPKS
Kecamatan Kebonsari Tahun 2020

No	UPPKS Desa	Modal (jt)	Anggota
1	Kebonsari	7	15
2	Bacem	5,7	14
3	Mojorejo Palur	6	14
4	Pucanganom	6	12
5	Singgahan	5	10
6	Tambakmas	10	25
7	Kradegan	5,2	15
	Jumlah	44,9	105

Data diolah PKK Kecamatan Kebonsari

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari modal yang diberikan oleh BKKBN pada tahun 2009 sebesar Rp. 500.000,- pada 13 Desa di Kabupaten Kebonsari, hanya 7 Desa yang dapat di kembangkan dan dapat digulirkan untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu desa Kebonsari, Bacem, Mojorejo Palur, Pucanganom, Singgahan, Tambakmas, Kradegan. Sedangkan desa di Kecamatan Ngoro yang gagal mengembangkan dana UPPKS adalah desa Balerejo, Kedondong, Rejosari, Sidorejo, Sukorejo, dan desa Tanjungrejo

Perbedaan pengembangan dana UPPKS yang berbeda dikarenakan keaktifan pengurus dan anggota dalam efektifitas kegiatan ekonominya. Seperti Desa Kebonsari, yang dapat menambahkan modalnya karena mendapatkan hadiah dari PKK Jawa Timur dalam kejuaraan lomba.

Deskripsi Analisis Hasil

1. Normalitas

Dalam uji normalitas, penulis menggunakan hasil uji dari kolmogorof-smirnov test dengan model dihasilkan sebagai berikut :

Tabel 2

Uji Normalitas secara menyeluruh
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Kemiskinan	Pemb_Daerah	Comdev_UPPKS
N		104	104	104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	6,0672	1,63	52,04
	Std. Deviation	,27093	,079	4,538
Most Extreme Differences	Absolute	,105	,104	,100
	Positive	,105	,101	,061
	Negative	-,105	-,104	-,100
Kolmogorov-Smirnov Z		1,666	1,645	1,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008	,009	,014

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada kolom variabel kemiskinan, pembangunan daerah dan Comdev UPPKS secara berurutan terdapat nilai kolmogorov-smirnov 1,666, 1,645 dan 1581 dengan nilai probabilitas 0,08; 0,0,09; 0,14 Asym. Sig. (2-tailed). Persyaratan data disebut normal jika probabilitas atau $p < 0,05$ (lebih besar) pada uji normalitas dengan kolmogorov smirnov. Oleh karena nilai $p = 0,08; 0,0,09; 0,14$ atau $p < 0,05$, maka diketahui bahwa data variabel pelayanan publik, budaya organisasi dan kinerja pegawai adalah normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.	Beta			Tolerance	VIF

			Error					
1	(Constant)	4,298	,299		14,397	,000		
	Pem_Daerah	,033	,004	,550	9,200	,000	,781	1,280
	Comdev_UPPKS	,037	,205	,011	,181	,856	,781	1,280

a. Dependent Variable: kemiskinan

Dilihat dari nilai VIF yang dimiliki kedua variabel yaitu kinerja pegawai dan budaya organisasi, keduanya memiliki Nilai VIF kurang dari 10, yaitu 1,28, sehingga variabel pembangunan daerah dan Comdev UPPKS dapat disimpulkan tidak terjadi gejala Multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi atau tidak. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Jika nilai Durbin Watson hitung mendekati atau di sekitar angka 2 maka model terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Batas atas yang digunakan adalah 4-dl dan batas bawahnya 4-du. Dari hasil tabel dengan $n=104$ dan $k=2$ diperoleh nilai $du=1,72$ dan $dl= 1,64$. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Negatif Autocorelation	No Autocorelation		Positif		
0	du	dl	2	4-dl	4-du
	1,72	1,64	2,066	2,28	2,44

Berdasarkan uji di atas tampak bahwa Durbin Watson hitung sebesar 2,066 terletak di daerah no autocorelation sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik statistic autokorelasi.

4. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 104 orang, maka nilai r table dapat diperoleh melalui $df = n-k$, dimana k merupakan jumlah butir pertanyaan

dalam suatu variabel. Jadi $df=104-3= 101$, maka $r \text{ table} = 0,223$. Butir pertanyaan dikatakan valid jika $r \text{ hitung} (0,985)$ yang merupakan nilai dari *corrected item, - total correlation* $> r \text{ tabel}$.

5. Analisis Hipotesa Regresi

Tabel 5

Model Summary									
Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,555	,308	,302	,22629	,308	55,179	2	104	,000

Tabel model summary di atas menunjukkan bahwa nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi adalah 0,555. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada di kategori sedang. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 30,2% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas Pembangunan Daerah (X1) dan Comdev UPPKS (X2) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 43% terhadap variabel Kemiskinan dan 57% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel Pembangunan Daerah (X1) dan Comdev UPPKS (X2), sebagaimana pada Anova pada Tabel 5.19.

Tabel 6
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,651	2	2,826	55,179	,000 ^a
	Residual	12,700	248	,051		
	Total	18,351	250			

a. Predictors: (Constant), Pemb_daerah, Comdev_UPPKS

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel Anova di atas menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari sebuah regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.). Jika Nilai Sig. $< 0,05$, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Sig. = 0,00 yang berarti $>$ kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier sudah memenuhi kriteria linieritas. Dengan demikian terjadi pengaruh yang signifikan

antara pembangunan daerah terhadap kemiskinan dan Comdev terhadap kemiskinan.

Tabel 7
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,298	,299		14,397	,000		
Pemb_daerah	,033	,004	,550	9,200	,000	,781	1,280
Comdev_UPPKS	,037	,205	,011	,181	,856	,781	1,280

a. Dependent Variable: kemiskinan

Maka berdasarkan tabel 5,20 untuk hipotesis yang diajukan, maka untuk variabel X1 (pembangunan daerah) adalah, $0,000 < \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama di terima. Sedangkan pada variabel X2 (Comdev UPPKS) adalah $0,856 > \text{probabilitas } 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua di tolak yang artinya tidak ada pengaruh Comdev UPPKS terhadap kemiskinan di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Tabel coefficient diatas menginformasikan model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom *Unstandardized Coefficients B* tersebut maka dapat dituliskan bahwa persamaan regresi berganda yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = 4,298 + 0,33 X_1 + 0,37 X_2$$

Persamaan di atas mengandung arti sebagai berikut:

Konstanta atau a sebesar 4,298, artinya apabila tidak ada perubahan pada program pembangunan daerah dan comdev UPPKS maka kemiskinan di Kecamatan Kebonsari akan tetap konstan sebesar 4,298.

Koefisien regresi untuk X1 sebesar $b_1 = 0,33$, artinya setiap peningkatan kegiatan pembangunan daerah (X_1) akan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten sebesar 0,33 satuan.

Koefisien regresi untuk X_2 sebesar $b_2 = 0,37$, artinya setiap peningkatan kegiatan Comdev UPPKS (X_2) akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebesar 0,37 satuan. Dengan peningkatan UPPKS pada kelompok PKK sebagai program yang berupaya untuk membantu keluarga miskin dalam mengembangkan kegiatan kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan pemberian modal melalui simpan pinjam modal.

PEMBAHASAN

Dalam rangka pelaksanaan penanganan kemiskinan, lebih menekankan pendekatan kesejahteraan yang menempatkan manusia sebagai subyek dalam sebuah model yang disebut “*People Centered*” sehingga sumber daya manusia menjadi lebih berdaya. Secara umum program pengentasan kemiskinan meliputi:

1. Pemberdayaan Manusia. Tujuannya adalah peningkatan SDM yang berorientasi pada:
 - a. Peningkatan keterampilan teknis dan manajerial guna mendukung penciptaan peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang sudah ada.
 - b. Peningkatan mutu kehidupan keluarga miskin melalui perbaikan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
 - c. Ruang lingkup kegiatannya meliputi penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan partisipasi masyarakat yang terorganisir berdasarkan keswadayaan bersama (gotong royong).
2. Pemberdayaan usaha. Dengan tujuan utama pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin. Ruang lingkup kegiatannya meliputi pemberian pelayanan keuangan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan, pengembangan permodalan usaha mikro, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis para pengusaha kecil, pengembangan kemampuan pemasaran produk, pembentukan jaringan kerja antar lembaga sosial ekonomi masyarakat, serta peningkatan hubungan antara usaha ekonomi masyarakat dengan lembaga keuangan dan permodalan.
3. Identifikasi Pemberdayaan Lingkungan. Komponen ini meliputi kegiatan kebutuhan sarana/prasarana pendukung sosial ekonomi, kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin (RTM) di bidang pendidikan, kesehatan dan fisik lingkungan, pembuatan rencana teknis pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan. Pemberdayaan lingkungan juga mencakup pengembangan sistem pemeliharaan sarana/prasarana secara mandiri oleh masyarakat sehingga dapat kelestarian manfaatnya. Selain itu dikembangkan pula konsep “Kader Pelestarian” lingkungan, yang akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara prasarana lingkungan secara mandiri dan berkesinambungan.
4. Manajemen pendampingan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen fasilitas pendampingan, pembimbingan langsung oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), kegiatan pemantauan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan program secara keseluruhan.

Mekanisme Pengelolaan Program

Mekanisme pengelolaan pengentasan kemiskinan meliputi beberapa tahapan sosialisasi, perencanaan, pencairan dana, pelaksanaan, pengendalian serta pertanggungjawaban dan pelestarian.

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam mendukung keberhasilan proses dan kegiatan program secara keseluruhan. Sosialisasi harus dimanfaatkan oleh semua pelaku program di semua tingkatan dan pada setiap saat atau kesempatan, guna mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui pertemuan-pertemuan di tingkat dusun/ kelompok/ lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan, musyawarah desa (musdes), melalui media cetak, elektronik dan lain-lain sesuai kondisi lokal.

2. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan setelah sosialisasi program yang dilakukan dengan tujuan menyusun usulan kegiatan secara partisipatif, membahas usulan, dan menetapkan alokasi anggaran. Rangkaian kegiatan perencanaan meliputi: pra-perencanaan; musdes perencanaan; penelitian usulan Desa/Kelurahan; Rakor KPK Kabupaten; dan Rakor KPK Propinsi.

3. Pencairan dana

Tahap akhir dari pengentasan kemiskinan adalah pencairan dana. Dalam proses tersebut, perlu adanya peranan dari berbagai pihak, agar tidak terjadi penyelewengan dan juga sebagai evaluasi atas pelaksanaan program yang ada.

Dari hasil penelitian di atas di dapat bahwa Comdev UPPKS (X_2) akan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebesar 0,37 satuan yang tergolong berpengaruh rendah, dan uji t pada hipotesis yang menolak adanya hubungan Comdev UPPKS terhadap kemiskinan ini disebabkan karena kendala-kendala dalam pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Ngoro, di antaranya:

1. Aspek Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan

- a) Masih minimnya pembinaan kepada pengurus maupun anggota kelompok UPPKS yang disebabkan karena jarak yang terlalu jauh, waktu yang kurang tepat, dan kepentingan-kepentingan lainnya.
- b) Pengelolaan administrasi dan keuangan kelompok yang belum terkelola dengan baik.
- c) Rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang pemasaran dan peningkatan daya saing produk.

2. Aspek Penerapan Gaya Kepemimpinan

- a) Adanya anggota kelompok yang tidak membayar angsuran modal, akan berdampak pada perputaran modal yang berkurang dan kecemburuan dari anggota lain yang setiap bulan mengangsur pinjaman modal yang diterimanya.
 - b) Masih kurangnya jumlah pendamping kelompok UPPKS dalam mengembangkan usaha.
3. Aspek Pemberian Bantuan Modal dan Minimnya Bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

Walaupun kontribusi kelompok UPPKS sebagai upaya pencapaian pengentasan kemiskinan di Kabupaten Madiun belum tercapai atau terlaksana dengan baik, sejauh ini masih hanya memberikan dampak ekonomi pada peningkatan pendapatan masyarakat, dampak sosial lingkungan sekitar dan dampak bagi pengembangan usaha yang sedang dikembangkan. Sedangkan untuk kontribusi secara keseluruhan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Madiun, namun memberikan pengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Kabupaten Madiun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa ada pengaruh signifikan pada pembangunan daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan Comdev UPPKS terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.. Tidak adanya pengaruh program Comdev UPPKS di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah disebabkan oleh kurangnya aspek peningkatan wawasan dan pengetahuan; aspek penerapan gaya kepemimpinan serta aspek pemberian bantuan modal dan minimnya bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) yang diterima.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan kelompok UPPKS di Kabupaten Madiun masih perlu perbaikan dan melakukan berbagai inovasi agar kedepannya dapat lebih berkembang. Oleh karena itu, berdasarkan temuan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah terkait sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana supaya melakukan koordinasi lintas sektor dengan semua pihak dari tingkatan bawah sampai atas dalam pengembangan usaha kelompok UPPKS.

2. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan mampu berjalan beriringan dan melakukan koordinasi dengan baik supaya usaha yang dikembangkan anggota kelompok UPPKS berjalan dengan baik.
3. Meningkatkan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan kepada pengurus dan anggota kelompok UPPKS untuk meningkatkan kemampuan sesuai bidang usaha. Pembinaan yang dapat dilakukan seperti pembinaan administrasi dan pembukuan agar anggota dapat mengerjakan pembukuan kegiatannya lebih sistematis;
4. Supaya diadakan pembinaan organisasi agar dapat mengikuti kegiatan kelompok secara aktif; serta pembinaan permodalan agar dapat menggunakan modal untuk mengembangkan usaha secara maksimal, dan mematuhi aturan peminjaman;
5. Hendaknya diadakan peningkatan pembinaan usaha ekonomi produktif agar selalu berusaha meningkatkan mutu hasil usaha; dan pembinaan pemasaran agar mampu memanfaatkan dan menciptakan peluang pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M & Firmansyah, A. 2012. Critical Appraisal on Journal of Clinical Trial. *The Indonesian Journal Medicine*, 4(44): 337-343.
- Achmad Kuncoro, Engkus dan Riduwan. 2008. *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur*. Bandung: Alfabeta.
- Ade Ermasari, 2009, *Dinamika Kemiskinan Di Jawa-Madura Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2007*, *Majalah Geografi Indonesia*, UGM, Yogyakarta
- Adrian, Payne, 1993, *The Essence of Services Marketing (Pemasaran Jasa)*, Andy, Yogyakarta.
- Agus Triyono, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) PT. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap*, *KomuniTi*, Vol. VI, No. 2 September 2014, Universitas Muhammadiyah Solo
- Ala, Andre B. 1981. *Strategi Anti Kemiskinan Lima Tahap*. *Analisa Tahun X*, No. 9, September 1981
- Alfian, Mely G. Tan, Selo Soemardjan. 1980. *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu Persada
- Amalia, Wia Rizqi., Wahyudin Nor dan M. Nurdiansyah, 2014, *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013)*
- Baswir, Revrisond. 1997. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE: Yogyakarta

- BKKBN. 2014. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga bagi Penyuluh Keluarga Berencana. Jakarta: Pusat Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Carminer, E. G., & Zeller, R. A., 1994. Reliability and Validity Assessment. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement). London: Sage Publication.
- Chambers, Robert. 1983. Rural Development Putting the Last First. Longman Inc
- Cortina, J. M., 1993a. Interaction, Nonlinearity, and Multicollinearity: Implications for Multiple Regression. *Journal of Management*, 19(4), 915–922.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, (2016) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. I, No. 4, Hal 9-14, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie (2017), Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Friedman, J. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative Development. Cambridge: Blackwell.
- Geertz, C, 1986, Mojokuto (Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa). Jakarta: PT Temprint
- Hersey dan Blanchard 2001. *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resource*, Prentice Hall, New Jersey.
- Hidayat, A.A. 2007, *Metode Penelitian dan Teknik Analisa Data*, Penerbit Salemba Medika
- Huraerah, Abu, 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora
- Ife, Jim. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan dan Suparmoko. 2007. *Ekonomika Pembangunan*, Edisi Kelima. Yogyakarta: Penerbit BPFPE.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM

- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Kenny, Susan, 1998. *Developing Communities for The Future*. Melbourne: An International Thomson Publishing Company
- Khodijah Mustaqimah, Sri Hartoyo, Idqan Fahmi, *Peran Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Pembangunan Manusia dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, hlm. 1-15 Vol 6 No 2, Edisi Desember 2017, FEM IPB.
- M Chairul Basrun Umanailo 2019, *Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]*, *Proceeding of Community Development is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*. *Relawan Jurnal Indonesia*, Universitas Sampoerna
- Malcom Payne and Gurid Aga Askeland, *Globalization and Int'l. Social Work: Postmodern Change and Challenge*, Ashgate, Burlington, VT., USA, 2008
- Malcom Payne, *Modern Social Work Theory*, 3th ed., Palgrave, Macmillan, NY., USA, 2005
- Malvin Delgado, *Community Social Work Practice in an Urban Context: The Potential of a Capacity-Enhancement Perspective*, Oxford University Press Inc, NY., USA, p.5.
- McIver, J.P. & Carminer, E.G. (1994). *Unidimensional Scaling*. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). *International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement)*. London: Sage Publication.
- Messick, S. (1995). *Validity of Psychological Assessment, Validation of Inferences from Persons Respond and Performance as Scientific Inquiry into Score Meaning*. *American Psychologist*, 741–749
- Muhammad Awaluddin Ardiansyah, Andi Djemma, Fajra Octrina (2017): *The Impact of Community Based Environmental Planning (Plbk) Supported by National Program for Community Empowerment (Pnpm) Over Society's Behaviour and Welfare Tier*, *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences* Vol. 5 No. 4, 2017
- Munir. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi*. NTB, Bappeda
- Neny Susanti (2017), *Pengembangan Community Based Economic Development Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 (Studi Deskriptif Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga*

- Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang). *Jurnal, Jurnal FISan* Vol. 3 No.2 2017, Universitas Airlangga Surabaya
- Nugroho, Iwan (2004), *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan/ Iwan Nugroho, Rochmin Dahuri*, Jakarta: LP3ES, 2004
- Priyono & Marnis (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Salim, Emil, 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES
- Siagian, Sondang P. 2004. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan
- Sirojuzilam. 2005. *Regional Planning and Development. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005*
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sullivan, J.L., & Feldman, S. (1994). *Multiple Indicators: An Introduction*. In Michael Lewis-Beck. (Eds.). *International Hand Book of Quantitative Application in the Social Sciences (Volume 4: Basic Measurement)*. London: Sage Publication
- Sumantri (2000). *Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Fakultas Psikologi Unpad
- Sumarsono S. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu
- Sumodiningrat, Gunawan. *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004
- Syamsul Hadi dan Arief Noor Akhmadi (2018) *Institutional Role of Local Economic Development in Village Isolated Jember*, *Jurnal Agritop*, Universitas Muhammadiyah Jember
- Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar: Gemilang Persada
- Todaro MP, Smith SC. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta (ID): Erlangga.
- Todaro, Michael, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka.